

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK

Melani Napitupulu

Universitas Negeri Medan

e-mail: [melani.napitupulu0105@gmail.com](mailto:melani.napitupulu0105@gmail.com)

**Abstrak** – Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap akuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah. SIMDA, yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Kota Medan dan beberapa daerah sekitarnya. Teknik pengumpulan data Peneliti mengacu pada hasil penelitian terdahulu dan literatur yang relevan untuk memahami konteks implementasi SIMDA serta faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan sistem manual menjadi hambatan utama dalam implementasi yang optimal. Selain itu, fitur audit trail pada SIMDA membantu memperkuat pengawasan keuangan, meskipun keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada dukungan manajemen dan pelatihan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Keuangan Publik.

*Abstract* – This study analyzes the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIMDA) on public financial accountability in local governments. SIMDA, developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), aims to improve transparency, efficiency, and accountability of public financial management according to Government Accounting Standards (SAP). The study was conducted using a qualitative approach in Medan City and several surrounding areas. Data collection techniques The researcher referred to previous research results and relevant literature to understand the context of SIMDA implementation as well as factors that influence public financial accountability. The results showed that the implementation of SIMDA improved the efficiency of financial management through automation of the recording process and more accurate reporting. However, challenges such as limited technological infrastructure, low human resource competence, and resistance to changes in the manual system are the main obstacles to optimal implementation. In addition, the audit trail feature of SIMDA helps strengthen financial oversight, although the success of the system is highly dependent on management support and ongoing training.

**Keywords:** Regional Financial Management Information System, Accountability, Public Financial.

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti ketidakcocokan data, pelaporan yang tidak tepat waktu, serta penyimpangan anggaran masih sering ditemukan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SIMDA dikembangkan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

SIMDA menawarkan berbagai keunggulan, seperti integrasi data keuangan dari berbagai unit kerja, otomatisasi proses akuntansi, pelaporan keuangan real-time, serta fitur audit trail untuk mendukung pengawasan. Dengan fitur-fitur ini, SIMDA diharapkan mampu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, implementasi SIMDA tidak selalu berjalan mulus di setiap daerah. Beberapa pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Selain itu, tingkat adopsi SIMDA yang beragam di berbagai daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Berbagai laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya temuan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan meskipun SIMDA telah diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja tidak cukup, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pengawasan yang ketat, pelatihan SDM yang berkelanjutan, dan komitmen dari pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek yang memengaruhi implementasi SIMDA. Khairunisa (2016) mencatat bahwa SIMDA berperan penting dalam membantu pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Selain itu, SIMDA memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil ini diperkuat oleh Gunawan dan Rahayu (2021), yang menunjukkan bahwa SIMDA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan memberikan laporan yang mudah diaudit dan sesuai regulasi.

Namun, terdapat perbedaan hasil dalam hal efektivitas implementasi. Suriani (2019) menyoroti bahwa keberhasilan SIMDA sangat variatif di berbagai daerah. Beberapa daerah yang memiliki infrastruktur memadai dan pegawai terlatih menunjukkan peningkatan signifikan dalam akuntabilitas keuangan. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan anggaran, rendahnya kompetensi SDM, dan resistensi terhadap perubahan menunjukkan implementasi SIMDA yang kurang optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja tidak cukup; keberhasilannya memerlukan dukungan manajemen yang kuat, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap akuntabilitas keuangan publik. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan SIMDA berhasil meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola keuangan publik di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah di Kota Medan. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Arfan ikhsan, 2021:144). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara

mendalam perspektif dan pengalaman para pelaksana serta pengguna SIMDA di tingkat pemerintah daerah di Kota Medan.

Teknik pengumpulan data Peneliti mengacu pada hasil penelitian terdahulu dan literatur yang relevan untuk memahami konteks implementasi SIMDA serta faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan publik. Studi ini membantu membangun kerangka teori yang kuat sebagai dasar analisis. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi tentang persepsi mereka terhadap efektivitas SIMDA, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku dan melihat dampak penggunaan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul terkait dengan efektivitas SIMDA dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan publik.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, peluang, dan dampak implementasi SIMDA terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan sejauh mana implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Berikut adalah hasil temuan yang lebih rinci:

#### **Penerapan SIMDA Berjalan Cukup Baik**

Di Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, penerapan SIMDA telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebagian besar pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan merasa bahwa SIMDA memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang lebih cepat dan lebih akurat. Proses pencatatan transaksi keuangan yang sebelumnya manual kini menjadi otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia.

Penerapan SIMDA di Kabupaten Langkat yang baru-baru ini mengimplementasikan sistem ini juga menunjukkan peningkatan dalam transparansi pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah dapat lebih mudah mengakses data keuangan yang terintegrasi, dan pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi lebih efisien. Hal ini mencerminkan temuan dari Putri dan Hartono (2020) yang menyatakan bahwa otomatisasi sistem dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan akurasi pencatatan.

#### **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi**

Meskipun implementasi SIMDA berjalan dengan baik di beberapa daerah, seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa daerah yang masih menghadapi kendala terkait infrastruktur teknologi. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Karo, yang mengalami masalah dengan keterbatasan akses internet dan perangkat keras yang tidak memadai. Hal ini berpengaruh pada kelancaran operasional SIMDA di daerah tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suriani (2019), yang menunjukkan bahwa daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi cenderung kesulitan dalam mengoptimalkan manfaat SIMDA. Infrastruktur yang kurang memadai menghambat kemampuan daerah dalam mengakses dan mengelola data keuangan secara efisien. Beberapa daerah yang tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang cukup canggih menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan SIMDA secara maksimal.

## **Tantangan dalam Kompetensi SDM**

Salah satu temuan utama lainnya adalah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM terkait penggunaan SIMDA. Banyak pegawai yang masih merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini, terutama mereka yang sebelumnya terbiasa dengan sistem manual. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Binjai, melaporkan bahwa meskipun SIMDA telah diimplementasikan, banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara mengoperasikan sistem dengan efektif.

Dalam hal ini, pelatihan yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini mengonfirmasi temuan dari Suriani (2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMDA sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan keterampilan pengguna. Tanpa pelatihan yang memadai, pegawai kesulitan mengoptimalkan penggunaan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

## **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Meskipun ada tantangan dalam penerapan SIMDA, sebagian besar responden di daerah yang telah mengimplementasikan SIMDA, seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan meningkat secara signifikan. Hal ini tercermin dalam proses pencatatan transaksi yang lebih baik, pelaporan yang lebih tepat waktu, dan kemudahan dalam memverifikasi data keuangan melalui fitur audit trail yang disediakan oleh SIMDA.

Fitur audit trail ini, yang memungkinkan pelacakan setiap transaksi secara rinci, berperan penting dalam mendukung pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya fitur ini, BPK dan auditor internal dapat dengan mudah melacak setiap transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian Gunawan dan Rahayu (2021), yang mengemukakan bahwa SIMDA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, terutama dengan menyediakan laporan yang mudah diaudit.

## **Resistensi terhadap Perubahan**

Salah satu temuan yang juga muncul adalah adanya resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan prosedur manual. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Sibolga, menunjukkan adanya penolakan atau ketidaksiapan dari pegawai terhadap penggunaan sistem baru. Pegawai yang sebelumnya bekerja dengan sistem manual merasa lebih nyaman dengan cara lama dan merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa perubahan sistem, terutama dalam pengelolaan keuangan publik, sering kali menemui hambatan berupa resistensi dari aparat pemerintah yang terbiasa dengan cara-cara lama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan yang cukup, serta memberikan dukungan moral dan teknis kepada pegawai agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru secara efektif.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA di beberapa pemerintah daerah di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun, memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, meskipun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, penerapan SIMDA di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat mencerminkan keberhasilan sistem dalam mengurangi kesalahan manual dan mempercepat pelaporan. Hal ini sesuai dengan

temuan Putri dan Hartono (2020), yang menyatakan bahwa otomatisasi sistem dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Namun, di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Karo, masih ditemukan kendala infrastruktur teknologi seperti akses internet yang terbatas dan perangkat keras yang tidak memadai, yang memengaruhi kelancaran implementasi SIMDA. Kendala ini sejalan dengan temuan dari Suriani (2019) yang menyebutkan bahwa daerah dengan keterbatasan infrastruktur cenderung kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan SIMDA.

Kedua, masalah kompetensi SDM juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SIMDA. Pegawai di beberapa daerah, seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Binjai, yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem baru, mengalami kesulitan dalam memanfaatkan SIMDA secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan agar SDM di pemerintah daerah dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Penelitian ini mengonfirmasi pendapat Suriani (2019) bahwa kompetensi SDM adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan dalam implementasi sistem informasi keuangan.

Ketiga, meskipun ada resistensi terhadap perubahan di beberapa daerah seperti Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Sibolga, mayoritas responden di daerah yang sudah mengimplementasikan SIMDA melaporkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pencatatan transaksi yang lebih baik, pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi, serta kemampuan untuk melacak setiap transaksi melalui audit trail, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Gunawan dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa SIMDA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama dengan menyediakan laporan yang lebih jelas dan mudah diaudit.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan, manfaat yang diperoleh dari implementasi SIMDA dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelatihan, dukungan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur teknologi, serta pendekatan yang lebih inklusif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dengan demikian, SIMDA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. SIMDA memungkinkan integrasi data keuangan, otomatisasi proses pencatatan, dan pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan fitur seperti audit trail, sistem ini membantu memperkuat pengawasan keuangan publik. Meskipun demikian, tantangan signifikan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam implementasi yang optimal. Beberapa daerah, terutama yang terpencil, menghadapi kendala infrastruktur dan anggaran yang terbatas, sementara pelatihan SDM belum merata untuk mengoperasikan sistem ini secara maksimal.

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, diperlukan langkah strategis, termasuk peningkatan pelatihan SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan komitmen manajemen daerah dalam mendukung implementasi SIMDA. Dengan pendekatan yang

inklusif, SIMDA diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikhsan, Arfan, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Madenatera.
- Gunawan, A., & Rahayu, S. (2021). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Melalui Implementasi SIMDA. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 10(2), 123-135.
- Khairunisa, N. (2016). Peran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 45-56.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi Offset.
- Putri, D., & Hartono, B. (2020). Analisis Efektivitas SIMDA dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 89-97.
- Suriani, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(4), 67-80.